

Strategi Pembelajaran PPKn untuk Pengembangan Sikap Toleran Peserta Didik di Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK

Julita Widya Dwintari
Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
Pos-el: juulita18@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara yang majemuk dengan berbagai perbedaan dan keberagaman baik agama, ras, bahasa, budaya, bentuk fisik, pendapat maupun kepentingan. Oleh karena itu, sikap toleran perlu dikembangkan pada diri setiap peserta didik. Sikap toleran merupakan sikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian baik pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, maupun kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Tujuan dari tulisan ini adalah mendeskripsikan strategi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk mengembangkan sikap toleran peserta didik di kelas XI SMA/MA/SMK/MAK. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mengkaji dokumen yang relevan. Salah satu Kompetensi Dasar (KD) di SMA/MA/SMK/MAK yang memuat pengembangan sikap toleransi di kelas XI SMA/MA/SMK/MAK adalah KD 2.4 bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Strategi pembelajaran PPKn untuk mengembangkan sikap toleran dapat dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penilaian dengan mengintegrasikan nilai toleransi. 1) Tahap persiapan, guru merencanakan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan mampu mengembangkan sikap toleran peserta didik dengan mengintegrasikan nilai toleransi dalam disain pembelajaran yang disusun dalam silabus dan RPP; 2) Tahap pelaksanaan guru melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan sikap toleran perlu mempertimbangkan sikap cinta damai, pengetahuan dan kompetensi keterampilan mendemonstrasikan. Salah satu model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan adalah *Value Clarification Technique* (VCT); 3) Penilaian sikap toleran dapat dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung dengan menggunakan observasi dan penilaian diri, dan/atau setelah proses pembelajaran selesai dengan menggunakan penilaian antarpeserta didik maupun jurnal.

Kata kunci : nilai toleransi, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sikap toleran

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang plural yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, ras, etnis, hingga bentuk fisik. Oleh karena itu, dapat dikatakan Indonesia adalah negara yang modern seperti yang didefinisikan oleh Kymlicka (2011), bahwa masyarakat modern semakin didasari sebagai masyarakat multikultural, yakni sebuah masyarakat yang tersusun dari berbagai macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai dengan sebuah negeri dengan banyak bangsa. Dengan kemajemukan yang ada, maka Indonesia pun menjadi negara yang rentan akan konflik.

Konflik yang terjadi, di Indonesia merupakan konflik akibat adanya sikap intoleran warga negara. Intoleran tidak selalu terjadi pada skala besar saja, namun, bisa terjadi di dalam sebuah kelompok (sekumpulan anak-anak bermain) (Moss, 2013: 53). Perbuatan-perbuatan anak dalam kelompok tersebut dikenal dengan nama perundungan.

Hasil penelitian dari SETARA Institute mencatat intoleransi di Indonesia melonjak dari tahun 2014, 2015 hingga 2016. Penyebabnya adalah 1) menguatnya dan menyebarnya kelompok-kelompok intoleran 2) melemahnya kebijakan dan regulasi negara, dan 3) lemahnya aparaturnya di hadapan kelompok intoleran (Jayabuana, 2016). Sementara KPAI

mencatat perundungan yang dilakukan anak pun ikut meningkat dari tahun 2015, 2016 dan masih terus terjadi di tahun 2017 (Kompas, 2017).

Sikap toleran perlu dimiliki oleh setiap warga negara agar mereka mampu menerima segala perbedaan dan keberagaman yang ada. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi mata pelajaran yang memiliki tugas untuk membentuk warga negara baik. Hal ini sebagaimana tujuan PPKn yang termuat di dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang menyatakan bahwa setiap peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi sesuai UUD 1945, memiliki nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta mampu berkomitmen dengan NKRI. Selain membentuk warga negara Indonesia menjadi seorang warga negara yang mampu menjaga perdamaian di negaranya, PPKn juga mengemban tugas untuk membentuk warga negara di suatu negara juga menjadi bagian dari warga negara global. Hal ini sesuai dengan pendapat Banks (2004:291) yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus membantu siswa dalam mengembangkan dan mengidentifikasi komunitas budaya dan negara, dan serta membantu mengem-

bangkan dan mengidentifikasi peran mereka di masyarakat dunia sabagai warga global.

Indonesia memiliki tujuan untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Oleh karena itu, Indonesia perlu untuk berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik di berbagai negara di dunia.

Tujuan mulia negara Indonesia tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari warga negaranya. Dukungan terbentuk karena warga negara berempati dan bertoleransi dengan konflik yang terjadi di negara lain. Hal ini dikarenakan warga negara Indonesia dibentuk bukan hanya sebagai seorang warga negara Indonesia saja tetapi mereka juga adalah warga negara global yang harus saling menjaga perdamaian satu sama lain. Maka dari itu, seorang guru PPKn memiliki peran sentral untuk membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang baik yang bertoleran, baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga negara global.

Pengembangan sikap toleran dapat dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan, hanya saja, untuk tingkat berpikir yang lebih tinggi dan mendalam (*high order thinking*), bisa dilakukan di jenjang pendidikan menengah atas. Sikap toleran merupakan salah satu sikap yang muncul secara eksplisit pada Kompetensi Dasar terutama untuk kelas XI SMA/MA/SMK/MAK sesuai Lampiran 20 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2016. Meskipun penanaman sikap toleran bisa dilakukan pada kompetensi manapun, namun, dikarenakan di kelas XI termaktub secara jelas, maka ada keharusan bagi guru untuk mengintegrasikannya terutama di kelas XI tersebut.

Guru harus memiliki kompetensi yang mendukung proses pembelajaran, yaitu kompetensi paedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Selain itu, guru harus mengajarkan siswa agar memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Akan tetapi, guru hanya berfokus pada pengembangan kompetensi paedagogik pada dirinya dan berkonsentrasi pada pengembangan pengetahuan siswa.

Permasalahan lain yang muncul yaitu guru hanya mengandalkan buku paket sebagai media pembelajaran, padahal guru memiliki otonomi untuk mengembangkan pembelajaran di kelasnya. Guru juga mengalami kebingungan dalam memilih model pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan

kompetensi sikap dan memiliki waktu persiapan lebih sedikit untuk memasukkan secara lengkap konten baru yang disarankan atau pendekatan yang efektif ke dalam kelas mereka (Torney-Purta dan Lopez, 2006: 17). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran yang bisa digunakan guru PPKn untuk mengembangkan sikap toleran peserta didik di kelas XI SMA/MA/SMK/MAK sesuai dengan tuntutan kompetensi kurikulum 2013.

Pengertian Sikap Toleran

Toleransi didefinisikan sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia (Walzer, 1997: 56). Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda (Kemendiknas, 2010: 9). Toleransi dipahami sebagai penolakan atas campur tangan atau kerelaan untuk sabar terhadap sesuatu. Padahal dengan demikian, toleransi harus dibedakan dengan pembiaran, yaitu ketidakpedulian dan pemanjaan secara suka rela (Kalidjernih, 2011: 115). Konsep membiarkan di sini tidak hanya membiarkan orang menjalankan keyakinannya sendiri, akan tetapi terbukanya kemungkinan kerjasama yang saking menguntungkan di tengah perbedaan-perbedaan pada masing-masing orang (Ujan, dkk, 2011: 51).

Toleransi bersumber dari niat dan semangat menghargai dan menghormati sesama dengan keyakinan bahwa semua manusia pada hakikatnya sama dan setara. Toleransi berarti kesediaan memberikan ruang dan kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan sesuatu yang menjadi keyakinan dan pendapatnya (Rusyan, 2013: 161). Batasan toleransi yakni ketika menjadi eksekutif atau merugikan orang lain (Kalidjernih, 2011: 117). Dengan demikian, dapat diartikan sikap toleran dapat diartikan sebagai sebuah sikap atau tindakan saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia di tengah perbedaan dalam masyarakat baik agama, suku, etnis, pendapat, sikap maupun tindakan orang lain yang berbeda dengan batasan ketika menjadi eksekutif atau selama tidak merugikan orang lain.

Konsep Pengembangan Sikap Toleran

Sikap adalah suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap sesuatu perangsang atau situasi yang akan dihadapi (Harsono, 2000: 141). Ahmadi (2002: 161) mengistilahkan sikap pada kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan yang mungkin akan terjadi. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap menurut Azwar (1997: 30) adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media

massa, institusi atau lembaga pendidikan, serta faktor emosi dalam diri individu.

Salah satu sikap yang dimiliki manusia adalah toleran. Toleransi, keadilan dan kedamaian adalah cita-cita yang mulia. Orang dewasa masih sulit untuk menyadari. Lembaga pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi sikap memiliki peran dalam membentuk sikap toleran peserta didik. Oleh karena itu, Guru yang di tingkat manapun, harus menghilangkan stereotip dan prasangka yang bisa menjadi sumber konflik, dan mendorong penghormatan terhadap perbedaan dan membangun komunitas di kelasnya (Teaching Tolerance, 2008).

Pengembangan sikap toleran dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai perbedaan, keberagaman dan toleransi pada siswa. Di Indonesia, pengembangan nilai karakter menjadi sebuah program khusus yang disebut dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digagas pada tahun 2017 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam peraturan tersebut Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan Penguatan Pendidikan karakter pada satuan pendidikan jalur Pendidikan formal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (4) penyelenggaraan PPK pada satuan Satuan pendidikan Jalur Pendidikan Formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab kepala satuan pendidikan formal dan guru.

Semua mata pelajaran pada dasarnya wajib untuk menguatkan pendidikan karakter, namun, PPKn menjadi salah satu mata pelajaran yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan karakter. Winarno (2015: 354) menjelaskan keterkaitan PPKn dengan pendidikan karakter dikarenakan pendidikan karakter dan pendidikan PPKn bukanlah sesuatu yang terpisah dan diajarkan dalam situasi yang terisolasi satu sama lain, namun PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter. Berdasarkan hal tersebut, guru PPKn harus menanamkan nilai toleransi pada peserta didik dengan menerapkan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai toleransi.

Konsep Strategi Pembelajaran

Strategi menurut Arifin (1984: 59) adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Strategi menurut David (Sanjaya, 2008:2) diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pembelajaran menurut Dimiyati dan Mudjiono (2009: 297) adalah suatu kegiatan guru secara terprogram dalam disain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Sementara Hamalik (2005: 57) mengartikan pembelajaran sebagai suatu kombinasi unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Uno (2011: 2) menjelaskan pengertian strategi pembelajaran sebagai cara yang digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik menerima dan memahami mata pelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan serangkaian cara yang akan digunakan guru untuk mencapai tujuan pendidikan.

Proses pembelajarann menurut Marzuki (2010: 8) dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian yang dijelaskan sebagai berikut. 1) Tahap perencanaan adalah usaha merancang proses pembelajaran dengan membuat silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam RPP berisi identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar; 2) Tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan dari apa yang telah disusun dalam RPP pada tahap perencanaan. Pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. Dalam proses ini guru juga bisa melakukan pengamatan sekaligus melakukan evaluasi (penilaian) terhadap proses yang terjadi, terutama terhadap karakter peserta didiknya; 3) Tahap evaluasi atau penilaian yaitu penilaian peserta didik untuk mengukur ketercapaian peserta didik atas pembelajaran yang dilakukan. Penilaian tidak hanya menyangkut pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga pencapaian afektif dan psikomotoriknya.

Strategi Pembelajaran PPKn untuk Pengembangan Sikap Toleran di Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK

Kurikulum 2013 mengamanatkan guru untuk melakukan pembelajaran yang holistik dengan mengajarkan nilai toleransi terutama untuk siswa kelas XI SMA/MA/SMK/MAK yang memiliki Kompetensi Inti 2 sikap sosial dengan Kompetensi Dasar 2.4 yaitu bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk

mengembangkan sikap toleran atas KD tersebut, guru harus mengintegrasikannya ke dalam materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi ini merupakan materi yang dikembangkan dari KD 1.4, KD 2.4, KD 3.4 dan KD 4.4 yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kompetensi Dasar 1.4, 2.4, 3.4 dan 4.4 Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar
1. Sikap Spiritual	1.4. Mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa
2. Sikap Sosial	2.4. Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3. Pengetahuan	3.4. Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Keterampilan	5.4. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Sumber: Kemendikbud (2016: 4)

Pembelajaran PPKn dilaksanakan secara holistik sesuai dengan karakteristik PPKn dalam rangka peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik secara utuh dalam proses pembelajaran yang saling terintegrasi antara kompetensi Inti Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan. (Tolib dan Nuryadi, 2017: 8). Untuk mewujudkan pembelajaran yang mengembangkan sikap toleran guru harus menginterasikan nilai toleransi pada perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.

Perencanaan Pembelajaran

Peterson, Mark, dan Clark (1978:431) menyarankan agar pada tahap perencanaan sebaiknya guru melakukan perencanaan dirumah. Hal ini juga disampaikan oleh Nadzir (2013: 339) yang menyatakan bahwa penyusunan pembelajaran harus dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Persiapan ini penting dilakukan agar guru dapat mengajar secara optimal. Pada tahap ini, guru harus merencanakan bagaimana materi yang diajarkan mampu mengembangkan sikap toleran peserta didik dengan mengintegrasikan nilai toleransi

dalam disain pembelajaran yang disusun. Nadzir (2013: 346) Guru harus memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Signifikansi yaitu perencanaan harus melihat aspek dikaitkan dengan tujuan pendidikan untuk mencapai tuntutan KD 1.4, 2.4, 3.4 dan 4.4
- b. Fleksibilitas yaitu perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan realistis antara biaya, waktu dan tingkat berpikir siswa.
- c. Relevansi yaitu berkaitan dengan jaminan adanya hubungan antara materi, pengembangan sikap religius dan toleransi, dan pengembangan keterampilan mendemonstrasikan.
- d. Kepastian yaitu perencanaan dibuat dengan mengurangi kejadian yang tidak tteerduga di luar perencanaan.
- e. Ketelitian yaitu perencanaan disusun secraa sederhana dan relevansinya.
- f. Adaptabilitas yaitu pembelajaran bersifat dinamis, sehingga perencanaan harus fleksibel dan dapat dirancang untuk menghindari hak-hal yang tidak diharapkan.
- g. Waktu yaitu perencanaan pembelajaran harus memperhatikan alokasi waktu yang tersedia.
- h. Monitoring yaitu pengembangan criteria untuk menjamin bahwa komponen pembelajaran bekerja dengan efektif
- i. Isi perencanaan yaitu memperhatikan: 1) tujuan untuk mentransfomasikan pengetahuan, sikap spiritual dan sikap toleran dan cinta damai, dan keterampilan mendemonstrasikan; 2) program dan layanan; 3) tenaga manusia; 4) keuangan, 5) bangunan fisik; 6) struktur organisasi; 7) konteks sosial.

Marzuki (2013: 8) menjelaskan bahwa pada prinsipnya, perencanaan pembelajaran adalah usaha merancang proses pembelajaran dengan membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) agar bernuansa moral, maka silabus dan RPP harus mengintegrasikan pendidikan karakter. Dengan demikian, perencanaan merupakan langkah-langkah perencanaan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran untuk pengembangan sikap toleran harus mengintegrasikaan nilai toleransi dalam proses pembelajaran yang direncanakan.

Pelaksanaan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada tahap ini merupakan kegiatan pendahulaun, inti dan penutup yang telah dipilih dan dilaksanakan sesuai RPP yang telah disusun dengan tujuan agar peserta didik mampu menginternalisasikan nilai toleransi agar terbentuk sikap toleran. Untuk melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merancang langkah-langkah pembelajaran terlebih dahulu. Pada dasarnya, kegiatan ini telah dirancang pada tahap perencanaan, hanya saja, dilakukan pada tahap pelaksanaan. Guru dituntut

untuk menguasai berbagai metode, model atau strategi pembelajaran. Dengan demikian guru dapat menentukan model pembelajaran apa yang cocok diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus pembelajaran yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran langsung adalah proses pendidikan dimana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung, peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis dan mengkomunikasikan apa yang telah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung (Tolib dan Nuryadi, 2017:12). Pembelajaran tidak langsung adalah poses pendidikan yang terjadi selama pembelajaran langsung, tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap (Tolib dan Nuryadi, 2017: 13).

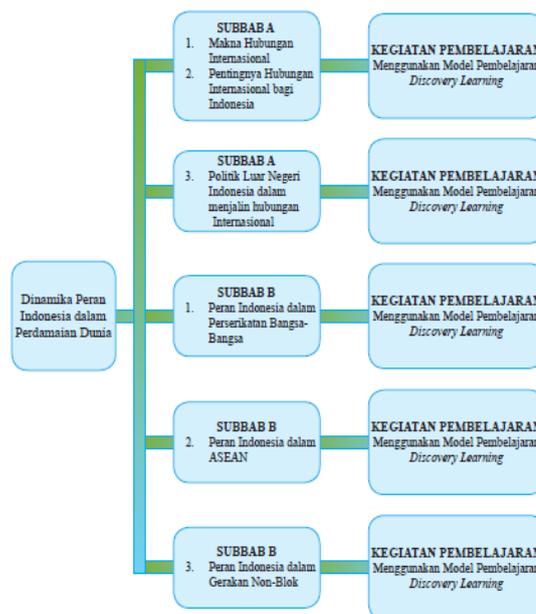
Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkaitan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran yang tidak langsung berkenaan dengan pembelajarannya yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2.

Model-model pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran antara lain klarifikasi nilai, bermain peran/simulasi, kajian karakter ketokohan. Pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran dialog sebagai model pembelajaran yang efektif, karena siswa dapat bekerja sama dan berpartisipasi dalam interaksi yang berharga. Pendekatan lain berbasis masalah yang mana siswa memiliki proses pembelajaran secara langsung. Atau diskusi yang bertujuan untuk merefleksikan proses pembelajaran langsung mereka.

Schuitema, ten Dam, dan Veugelers (2008:75) menyarankan model studi tentang pendidikan moral adalah kelas diskusi atau diskusi dalam kelompok kecil, pembelajaran berbasis masalah, bekerja dengan kelompok, diskusi, dan menggunakan topik subjek yang mencakup masalah moral, dilema, dan nilai. Dialog dan interaksi juga dianggap penting untuk meningkatkan perkembangan prososial dan moral siswa. Guru juga bisa menggunakan cerita (*Story Telling*) untuk mengajarkan informasi faktual, mengeksplorasi nilai-nilai budaya, dan membantu siswa untuk mengembangkan nilai (Demircioglu, 2010:105).

Meskipun *story telling* cocok mengembangkan nilai, namun model *story telling* ini kurang cocok untuk mengembangkan kompetensi keterampilan mendemonstrasikan sesuai tuntutan KD 4.4.

Buku guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan revisi 2017 menganjurkan model *discovery learning* sebagai model pembelajaran untuk menyampaikan materi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Model Pembelajaran untuk Materi Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia Kurikulum 2013

Sumber: Kemendikbud (2017: 151)

Model *discovery learning* disarankan karena adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan yang mengamanatkan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*) untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik dan tematik terpadu.. Untuk mendorong kemampuan peserta didik agar menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka disarankan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) (Kemendikbud, 2016:3).

Penggunaan dua model pembelajaran di atas, bukan hal yang kaku. guru tetap dapat menggunakan model pembelajaran selain yang dianjurkan peraturan perundang-undangan tersebut, karena proses pembelajaran harus disesuaikan dengan: 1) tujuan pembelajaran yang mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai KI dan KD; 2) karakteristik peserta didik; 3) alokasi waktu; 4) sumber belajar dan

media pembelajaran yang tersedia; 5) kompetensi guru, 6) sarana dan prasarana. Dengan demikian, pemilihan model pembelajaran yang cocok untuk mengembangkan sikap toleran sebagaimana tuntutan KD 2.4 tidak harus *discovery learning*, namun bisa model pembelajaran lain tentu saja tidak boleh terlepas dari tujuan tuntutan KD 1.4, 3.4, dan 4.4.

Guru sebaiknya dalam melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan sikap toleran perlu mempertimbangkan sikap cinta damai, pengetahuan dan kompetensi keterampilan mendemonstrasikan. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan model pembelajaran yang dapat mendorong siswa aktif, berpikir kritis, menimbulkan sifat empati dan simpati, mengembangkan nilai-nilai karakter, serta melatih siswa menerima nilai orang lain. Model pembelajaran yang disarankan adalah *Value Clarification Technique* (VCT) atau klarifikasi nilai.

Sanjaya (2011: 283) berpendapat bahwa VCT dapat membantu siswa mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggapnya baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. VCT dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk: 1) mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai; 2) menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki; 3) menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional (logis) dan diterima siswa; 4) melatih siswa dalam menerima dan menilai nilai dirinya dan posisi nilai orang lain (Taniredja, Faridli, & Harmianto, 2011: 88).

Berdasarkan hal tersebut, VCT dapat digunakan sebagai model pembelajaran untuk mengembangkan sikap toleran. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun Dalam RPP. Guru hendaknya memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran serta mampu menguasai proses pembelajaran dikarenakan selalu ada kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pasal 1 ayat (2)). Penilaian Pembelajaran terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian menjelaskan penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Pasal 12 ayat (1) menjelaskan penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan: 1)

mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran; 2) mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan; 3) menindaklanjuti hasil pengamatan; 4) mendeskripsikan perilaku peserta didik.

Penilaian sikap toleran dapat dilakukan dengan menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik maupun jurnal. Penilaian pembelajaran untuk menilai sikap toleran siswa dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Observasi dan jurnal merupakan jenis penelitian yang termasuk pada penilaian pada saat proses berlangsung. Sementara penilaian setelah proses berlangsung dapat dilakukan dengan penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik. Dalam menyusun penilaian guru hendaknya menyusun rubrik penilaian yang jelas. Untuk mengukur keberhasilan pengembangan sikap toleran, guru sebaiknya guru menggunakan minimal dua bentuk penilaian, misalnya observasi dan penilaian diri.

Penutup

Pengembangan sikap toleran dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai perbedaan, keberagaman dan toleransi pada siswa. Strategi pembelajaran PPKn untuk pengembangan sikap toleran peserta didik di kelas XI SMA/MA/SMK/MAK dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan nilai toleransi pada tahapan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Pengembangan sikap toleran perlu dilakukan secara holistik dan terintegrasi satu sama lain antara KD 1.14, 2.4, 3.4 hingga 4.4.

Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan membuat silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam RPP berisi identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Dalam tahap perencanaan, guru perlu mengintegrasikan nilai toleransi, memperhatikan materi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, sikap spiritual bersyukur, dan keterampilan mendemonstrasikan pada silabus dan RPP yang dibuatnya agar siswa mampu bersikap toleran dan cinta damai.

Tahap pelaksanaan pembelajaran merupakan pelaksanaan atas langkah-langkah yang telah disusun dan direncanakan dalam RPP. pengembangann sikap toleran perlu mempertimbangkan sikap spiritual, cinta damai, pengetahuan dan kompetensi keterampilan mendemonstrasikan sesuai tuntutan KD 1.4, 3.4, dan 4.4. Oleh karena itu, guru harus menggunakan model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif, berpikir kritis, menimbulkan sifat empati dan simpati, mengembangkan

nilai-nilai karakter, serta melatih siswa menerima nilai orang lain dengan mempertimbangkan: 1) tujuan pembelajaran yang mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai KI dan KD; 2) karakteristik peserta didik; 3) alokasi waktu; 4) sumber belajar dan media pembelajaran yang tersedia; 5) kompetensi guru, 6) sarana dan prasarana.

Model pembelajaran yang disarankan adalah (*Value Clarification Technique* (VCT) atau klarifikasi nilai. Penilaian sikap toleran dapat dilakukan dengan menggunakan observasi, penilaian diri, penilai antar-peserta didik maupun jurnal dengan menyertakan rubrik penilaian yang jelas. penilaian sikap sebaiknya menggunakan dua jenis penilaian. Guru harus memiliki kompetensi profesional, paedagogik, sosial dan kepribadian agar mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu. (2002). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, Anwar. (1984). *Strategi Komunikasi*. Bandung: Amarello.
- Azwar, Saifudin, 1997. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Banks, J. A. (2004). Teaching for Social Justice, Diversity, and Citizenship in a Global World. *The Educational Forum*, 68, 289-298.
- Carbines, Robert, Wyatt, Tim, & Robb, Leon. (2006). *Encouraging Tolerance and Social Cohesion through School Education*. Australia: Erebus International.
- Demircioglu, Ismail H. (2010). Using Historical Stories to Teach Tolerance: The Experiences of Turkish Eighth-Grade Students. *The Social Studies*, 99 (3), 105-110.
- Dimiyati dan Mudjiono. (2009). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar. (2005). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harsono. 2000. *Teori Sikap dan Perilaku*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jayabuana, Nuriman (2016). *Kebebasan Beragama Terancam*. Diunduh 29 Oktober 2017, from Civiced: <http://setara-institute.org>
- Kalidjernih, Freddy K. (2011). *Puspa Ragam, Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara.
- Kemendiknas. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum.
- Kemendikbud. (2016). *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2016). *Lampiran 24 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Buku Guru Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK*. (Eds. Rev). Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- Kymlicka, Will. (2011). *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.
- Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C. (2002). *Eleven Principles of Effective Character Education*. Diunduh 29 Oktober 2017, from Civiced: <http://digitalcommons.unomaha.edu>
- Moss, Barbara. (Eds). (2013). Teaching Tolerance: Resources for Students and Teachers. *Voices from the middle*, 20 (3).52-56.
- Marzuki. (2013). *Etika Moral dalam Pembelajaran*. Diunduh 29 Oktober 2017, from Civiced: <http://staff.uny.ac.id>
- Nadzir, M. (2013). *Perencanaan pembelajaran Berbasis Karakter*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2 (2), 338-352.
- Peterson, Penelope L. Marx, Ronald W. & Clark, Christopher M. (1978). Planning, Teacher Behaviour, and Student Achievement. *American Education Research Journal*, 15 (3), 417-432.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Pendidikan.
- Rusyan, H.A. Tabrani. (2013). *Membangun Disiplin Karakter Anak Bangsa*. Jakarta: Pusaka Dinamika.
- Sanjaya, Wina. (2008). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sanjaya, Wina. 2011. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Schuitema, Jaap; ten Dam, Geert, & Veugelers, Wiel. (2008). Teaching Strategies for Moral Education: A Review. *Journal of Curriculum Studies*, 40 (1), 69-89.
- Taniredja, T., Faridli, M.E. & Harmianto, S. (2011). *Model-model Pembelajaran Inovatif*. Bandung: Alfabeta.

Teaching Tolerance. (2006). *Starting Small Teaching Tolerance in Preschool and the Early Grades*. Alabama: Southern Poverty Law Center.

Tolib dan Nuryadi. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Buku Guru*. (Eds. Rev). Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Torney-Purta, Judith & Lopez, Susan Vermeer. (2006). *Developing Citizenship Competencies from Kindergarten through Grade 12: A Background Paper for Policymakers and Educators*. Denver: Education Commission of the States.

Ujan, A. A., dkk. (2010). *Multikulturalisme: belajar Hidup bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: Indeks.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Uno, Hamzah B. (2011). *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Walzer, Michael. (1997). *On Toleration Castle Lectures in Ethics, Politics, and Economics* (New York: Yale University Press.

Winarno. (2015). Integrasi Nilai Karakter dalam Materi Pembelajaran PPKn di SMA. *Prosiding Aktualisasi Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar Menuju Peserta Didik yang Berkarakter*. Surakarta, 353-364.